

# PENGARUH PEREMPUAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN: ANALISIS REGRESI PANEL WILAYAH PARIWISATA DAN NONPARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 2017- 2024

Kautsar Hilmi Izzuddin<sup>1\*</sup>, Muhammad Dzaky Fawwaz<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: [kautsar.hilmi@bps.go.id](mailto:kautsar.hilmi@bps.go.id), [dzaky.fawwaz@bps.go.id](mailto:dzaky.fawwaz@bps.go.id)

## ARTIKEL INFO

## Abstract

### *Article history:*

*Received 5 April, 2026*

*Revised 29 April, 2026*

*Accepted 11 Juny, 2026*

*Published 30 Juny, 2026*

**Introduction/Main Objectives:** Nusa Tenggara Timur (NTT) consistently occupies a position as one of the provinces with the highest poverty levels in Indonesia. This situation is further worsened by poverty reduction targets that have not been met as of 2024, even though the region has great tourism potential. This poverty phenomenon is also closely linked to the economic participation of women. **Background Problem:** This study aims to analyze the impact of women on poverty and compare this effect between tourism and non-tourism areas in NTT. **Novelty:** While many studies on poverty have been conducted, research that compares the role of women by separating tourism and non-tourism bases in NTT remains very limited. **Research Method:** This study uses panel data regression analysis from 22 regencies during the 2017–2024 period, which also splits the model into tourism and non-tourism categories. **Finding/Results:** Results show that increases in women's life expectancy, expenditure, and literacy rates significantly lower poverty in tourism areas. However, in non-tourism areas, the labor force participation rate and literacy are the main factors, while life expectancy does not have a significant effect. On the contrary, the percentage of women of productive age does not show a significant impact in either region.

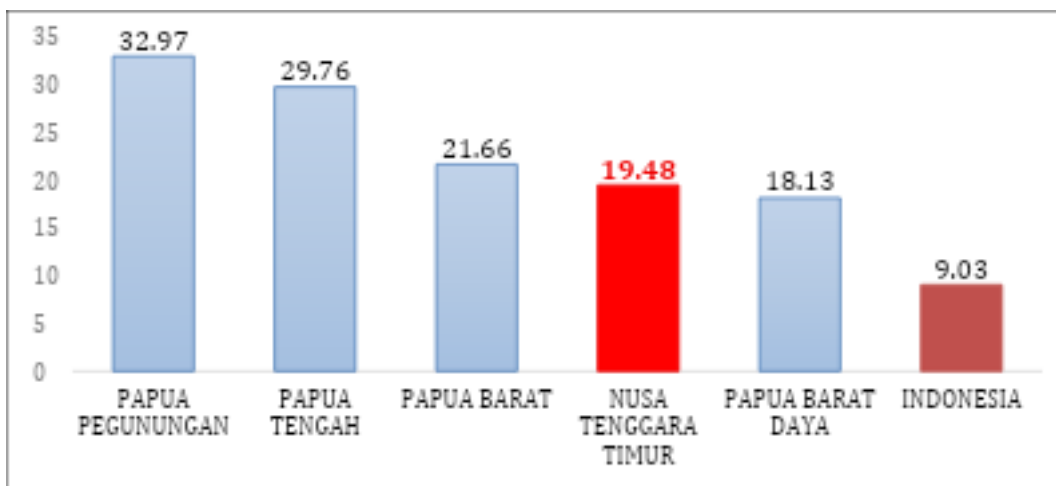
### **Keywords:**

Nusa Tenggara Timur; Panel Data Regression; Poverty; Tourism; Women

## 1. Pendahuluan

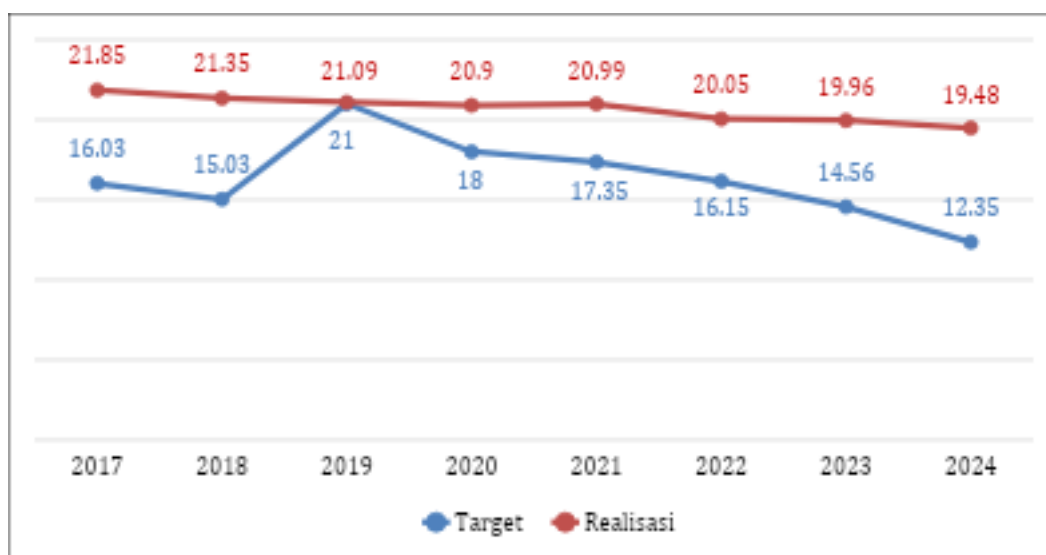
Kemiskinan telah menjadi masalah yang dianggap penyakit sosial dan ekonomi di seluruh negara dan akar berbagai masalah (Prawoto, 2009; Suharianto & Lubis, 2022). United Nations (2018) menekankan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) difokuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) (Pemprov NTT, 2025). Strategi ini

dijabarkan salah satunya Dasa Cita ke-2 dan Dasa Cita ke-3 yang memposisikan perempuan dalam pariwisata sebagai lokomotif ekonomi inklusif.



Gambar 1. Lima Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa NTT termasuk ke dalam provinsi dengan persentase penduduk miskin keempat tertinggi pada tahun 2024 beserta provinsi lainnya yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI). Persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 9,03 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di NTT mencapai hingga dua kali lipat yaitu sebesar 19,48 persen. Sejak tahun 2017, proporsi penduduk miskin di NTT mencapai 21,85 persen atau sebanyak 1.150,8 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2024).



Gambar 2. Target Penduduk Miskin (%) dan Realisasi Penduduk Miskin (%) di Provinsi NTT Tahun 2017-2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa target persentase penduduk miskin Provinsi NTT berada di rentang 12-21 persen. Namun, realisasinya tidak sejalan dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017, realisasi penduduk miskin mencapai 21,85 persen, jauh di atas target sebesar 16,03 persen. Hal yang sama terus terjadi hingga tahun 2024

yang menunjukkan target yang ditentukan tidak pernah tercapai. Persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun walaupun terus mengalami penurunan, tetapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Pada tahun 2024, persentase perempuan di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 9,20 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki (8,86 persen). Di Provinsi NTT persentase penduduk perempuan pada tahun 2024 sebesar 49,99 persen, angka ini tentunya berkaitan dengan peran perempuan terhadap kemiskinan yang belum terselesaikan. Sejalan dengan Todaro & Smith (2015) bahwa perempuan justru mendominasi dalam jumlah penduduk miskin di lingkup dunia. Adnan & Amri (2020) menemukan hubungan antara kemampuan beberapa penduduk yang berdaya rendah di kehidupan yang layak terhadap kemiskinan. Maka, yang dapat berperan adalah perempuan (Bentian, 2015; Owusu et al., 2013). Padahal, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dengan potensi wisata yang tinggi (Pemprov NTT, 2019). Kekayaan budaya dan wisata berhasil menarik kunjungan wisatawan nusantara hingga 7,9 juta orang pada tahun 2024 serta mengalami kenaikan wisatawan mancanegara sebesar 53,78 persen dibandingkan tahun 2023 (BPS Prov. NTT, 2025).

BPS (2023) mendefinisikan kemiskinan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini diukur melalui Garis Kemiskinan. Haughton & Khandker (2009) mendefinisikan salah satu karakteristik penyebab kemiskinan adalah dari dimensi demografis. Todaro dan Smith (2015) menjelaskan perempuan menjadi mayoritas penduduk miskin di dunia karena lebih sulit menerima akses terhadap pendidikan, jaminan sosial, serta program pekerjaan. World Bank (2010) dan Barro et al. (2013) menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki.

Haughton & Khandker (2009) juga berpendapat melek huruf merupakan indikator krusial untuk menentukan kemampuan golongan miskin dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan (begitu juga Dores & Koto, 2014). Di bidang kesehatan, daerah dengan angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan akses dan kualitas kesehatan baik sehingga peluang bekerja juga semakin tinggi di wilayah tersebut, yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Ginting, 2020; Fikri & Suparyati, 2017).

Tingginya pengeluaran per kapita sesuai konsep BPS (2023) sering kali dikaitkan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Finkayana & Urmila Dewi (2016) menjelaskan pengeluaran per kapita memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (begitu juga Todaro & Smith, 2015). Kurniasih et al. (2022) berpendapat tenaga kerja menjadi salah satu instrumen menurunkan kemiskinan. Todaro & Smith (2015) juga menyebutkan bahwa perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Seseorang yang miskin juga cenderung untuk tinggal di rumah tangga yang di dalamnya terdapat banyak anak dengan usia di bawah 15 tahun (Haughton & Khandker, 2009).

Pemberdayaan ekonomi perempuan dianggap sebagai salah satu pendorong utama

pengentasan kemiskinan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengembangan pariwisata hanya didominasi kelompok laki-laki (Stonich et al., 1995; Scheyvens, 2010; Tucker & Boonabaana, 2012). Partisipasi perempuan dalam industri pariwisata terbukti berkorelasi positif dengan kesejahteraan, menurut Widiastini et al. (2026) dan McCall & Mearns (2021). Selain itu, menurut Marizka et al., (2024), keterlibatan aktif perempuan dalam organisasi pariwisata membantu mengurangi ketimpangan gender (sejalan dengan Supraja & Asdi Artosa, 2023).

Beberapa penelitian tentang pengaruh perempuan telah dilakukan. Sumaw & Aisyah (2023) dengan lokus Provinsi Bali. Prasetya & Sumanto (2022) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan tahun 2011-2020, sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan pengaruh perempuan terhadap kemiskinan antara sektor pariwisata dan nonpariwisata. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi NTT menggunakan regresi data panel dari tahun 2017 hingga 2024, dengan membandingkan dampaknya antara kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata dan nonpariwisata.

## 2. Metodologi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang menggabungkan data cross-sectional dari 22 wilayah administratif di Provinsi NTT, 21 kabupaten dan 1 kota dengan data *time-series* untuk periode tahun 2017–2024.

### 2.1. Bahan dan Sumber Data

Tabel 1. Data dan sumber data variabel

No	Data	Sumber	Satuan
<b>Variabel Dependen</b>			
1	Persentase penduduk miskin	Website BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persen (%)
<b>Variabel Independen</b>			
2	Angka harapan hidup Perempuan	Website BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tahun
3	Pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2024	Ribu rupiah/orang/tahun
4	Angka melek huruf perempuan 15 tahun ke atas	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2024	Persen (%)
5	Persentase perempuan usia produktif	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2024	Persen (%)
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2024	Persen (%)

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rincian pada Tabel 1. Pada penelitian ini dilakukan segregasi untuk pemodelan yaitu model pariwisata mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi NTT yang memiliki potensi wisata yaitu Alor, Belu, Ende, Kota Kupang,

Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Sedangkan model nonpariwisata mencakup 12 kabupaten lainnya (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Lembata, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka).

## 2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang diolah melalui *software* R-Studio menggunakan *package* “plm” oleh Croissant & Millo (2008). Dalam regresi data panel, terdapat tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Greene, 2012). CEM adalah model yang tidak memperhatikan efek individu dan periode pada data panel atau *pooled regression* (Baltagi, 2005). FEM adalah model yang memperhatikan perbedaan efek antar individu ( $\mu_i$ ) pada data panel (Gujarati & Porter, 2008). REM adalah model yang mempertimbangkan setiap individu dalam data panel memiliki efek yang tetap, tetapi memiliki asumsi efek individu yang stokastik (Baltagi, 2005) Dalam penelitian ini, dilakukan estimasi model CEM sebagai berikut.

$$PO_{i,t} = \nu + \beta_1 X_{1,i,t} + \beta_2 X_{2,i,t} + \beta_3 X_{3,i,t} + \beta_4 X_{4,i,t} + \beta_5 X_{5,i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Dimana  $i$  adalah kabupaten/kota ke- $i$  di Provinsi NTT,  $t$  adalah tahun ke- $t$ ,  $X_1$  sebagai AHH\_P,  $X_2$  sebagai Pengeluaran\_P,  $X_3$  sebagai AMH\_P,  $X_4$  sebagai Produktif\_P, dan  $X_5$  sebagai TPAK\_P.

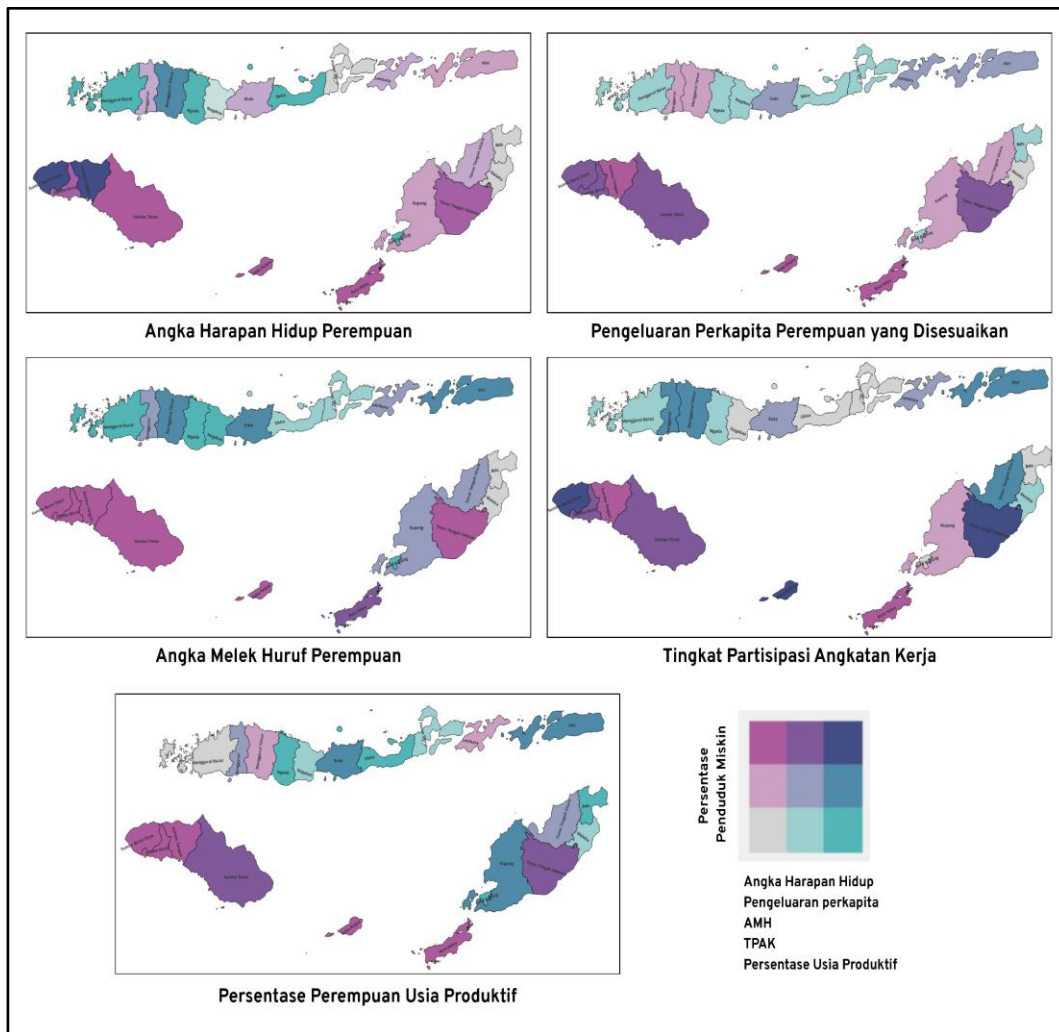
Pada estimasi model panel, perlu dilakukan penentuan model terbaik. Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui kuadrat residual dalam panel ditambahkan variabel *dummy* sebagai *fixed effect* (Widarjono, 2018). Jika hasil uji statistik *Chow* menunjukkan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka model FEM lebih baik daripada CEM. Selanjutnya, dilakukan Uji *Breusch Pagan-Lagrange Multiplier* (BP-LM), jika nilai *LM* menunjukkan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka model REM lebih baik daripada CEM. Kemudian, uji *Hausman* dilakukan untuk mengetahui endogenitas pada variabel independen (Greene, 2012). Jika nilai  $H$  menunjukkan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka model FEM lebih baik daripada REM.

Jika model terbaik yang terpilih adalah model *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji lanjutan yaitu memeriksa struktur varians-kovarians residual untuk melihat masalah heteroskedastisitas atau autokorelasi (Greene, 2012). Selanjutnya, model perlu diuji menggunakan asumsi klasik berupa uji normalitas, homoskedastisitas, nonautokorelasi, dan nonmultikolinearitas jika estimasi yang digunakan adalah *ordinary least squares* (OLS). Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* berdasarkan Razali & Yap (2011) dan uji Jarque-Bera yang mengikuti *Chi square* (Gujarati & Porter, 2008).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan diawali dengan identifikasi melalui pendekatan spasial untuk melihat pola hubungan awal antara variabel independen dengan tingkat kemiskinan melalui pemetaan bivariat. Pendekatan ini menjadi landasan dalam memahami heterogenitas

karakteristik wilayah di Provinsi NTT, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam segregasi pemodelan regresi. Gambar 3 menunjukkan peta bivariat hubungan variabel independen terhadap rata-rata persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi NTT.



Gambar 3. Peta bivariat hubungan variabel independen terhadap rata-rata persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi NTT, 2017-2024.

Gambar 3 menunjukkan pola yang berlawanan arah antara AHH perempuan dengan tingkat kemiskinan. Daerah dengan AHH perempuan tinggi memiliki tingkat kemiskinan rendah berada di bagian barat dan tengah Pulau Flores (Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sikka) serta Kota Kupang. Sebaliknya, daerah dengan AHH perempuan rendah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi berada di bagian selatan wilayah Provinsi NTT, meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Pengeluaran per kapita perempuan juga menunjukkan pola berlawanan arah terhadap kemiskinan. Daerah dengan pengeluaran perempuan tinggi dan tingkat kemiskinan rendah mendominasi kawasan pesisir utara dan barat Pulau Flores serta

wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Sebaliknya, daerah seperti Pulau Sumba serta wilayah selatan Pulau Timor seperti Kabupaten TTS dan Kabupaten Rote Ndao tercakup dalam pengeluaran perempuan rendah dengan kemiskinan tinggi.

Selanjutnya, AMH perempuan juga berlawanan arah dengan AMH tinggi dan kemiskinan rendah terpusat pada Pulau Flores dan sentra urban Kota Kupang. Sebaliknya daerah dengan AMH rendah dan tingkat kemiskinan tinggi membentuk episentrum kerentanan di seluruh kabupaten di Pulau Sumba, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Sebaliknya, persentase perempuan usia produktif menunjukkan pola yang lebih heterogen dan tidak searah terhadap kemiskinan. Daerah dengan persentase perempuan usia produktif tinggi tetap memiliki tingkat kemiskinan tinggi (Pulau Sumba dan Kabupaten TTS). Namun, terdapat juga daerah dengan persentase usia produktif menengah-rendah tetapi kemiskinan terkendali (Kabupaten Manggarai Barat). Korelasi kompleks juga ditunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap kemiskinan. Daerah wilayah agraris seperti Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Alor di Pulau Flores memiliki pola TPAK tinggi dan kemiskinan rendah. Namun, terdapat daerah seperti Kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu Raijua memiliki pola TPAK tinggi dengan kemiskinan yang tinggi.

Variasi pola sebaran pada peta mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi dan sosial di setiap daerah tidaklah seragam. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berhenti pada satu model utama. Model regresi kemudian disagregasi menjadi dua kelompok, yaitu kabupaten/kota daerah pariwisata dan nonpariwisata. Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi 2015-2025, pariwisata diposisikan sebagai sektor unggulan yang diarahkan untuk menggerakkan ekonomi daerah secara terpadu melalui penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPV) (Pemprov NTT, 2015). Arah kebijakan telah menciptakan struktur ekonomi yang berbeda, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Sintesis antara pola sebaran spasial pada peta bivariat dan landasan kebijakan dalam Perda tersebut menunjukkan adanya heterogenitas karakteristik ekonomi yang nyata antar kabupaten/kota.

Maka berdasarkan Perda tersebut, penelitian ini melakukan segregasi pemodelan menjadi dua kelompok utama. Model pertama adalah model pariwisata yang mencakup 10 kabupaten/kota dengan potensi dan penetapan destinasi strategis, yaitu Alor, Belu, Ende, Kota Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Sementara itu, 12 kabupaten lainnya (Kupang, TTS, TTU, Lembata, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, dan Malaka) dikelompokkan ke dalam model nonpariwisata, di mana perekonomian masih cenderung didominasi sektor primer.

Tabel 2. Ringkasan hasil pengujian model regresi terbaik.

Statistik Uji	Nilai Statistik	Prob	Keputusan
Uji Chow (F*)	F*: 1085,6	0,000	Model FEM lebih baik dari CEM
Uji Hausman (H)	H: 1,14	0,950	Model REM lebih baik dari FEM
Uji Lagrange Multiplier	LM: 514,18	0,000	Model REM lebih baik dari CEM
Kesimpulan: Model REM			

Tabel 2 menunjukkan hasil uji spesifikasi model pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Berdasarkan uji Chow, nilai *p-value* yang dihasilkan sebesar 0,000 ( $p\text{-value} < \alpha = 0,05$ ), artinya penggunaan model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, uji Hausman menunjukkan nilai *p-value* yang dihasilkan sebesar 0,950 ( $p\text{-value} > \alpha = 0,05$ ), artinya model *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada FEM. Maka, model regresi panel yang akan digunakan untuk model keseluruhan 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT adalah Panel REM.

Tabel 3. Estimasi REM

Variabel	Koefisien ( <i>p-value</i> )	
Constant	65.065 (0.0000)**	
AHH_P <sub>i,t</sub>	-0,378 (0,0167)**	
Pengeluaran_P <sub>i,t</sub>	-0,001 (0,0000)**	
AMH_P <sub>i,t</sub>	-0,113 (0,0000)**	
Produktif_P <sub>i,t</sub>	0,019 (0,3364)	
TPAK_P <sub>i,t</sub>	-0,019 (0,0029)**	
<i>Adjusted R</i> <sup>2</sup> = 0,72	<i>R</i> <sup>2</sup> = 0,73	<i>F-statistic</i> = 462,045 Prob( <i>F-Statistic</i> ) = 0,000
Uji Normalitas	<i>W</i> = 0,99	Prob = 0,076
Uji Multikolinearitas	<i>Centered VIF</i> AHH_P <sub>i,t</sub> = 1,15; PengeluaranKapita_P <sub>i,t</sub> = 1,67; AMH_P <sub>i,t</sub> = 1,56; Produktif_P <sub>i,t</sub> = 1,83; TPAK_P <sub>i,t</sub> = 1,09	

Keterangan: \*\* adalah signifikan 5 persen

Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi REM untuk keseluruhan wilayah Provinsi NTT. Secara simultan, variabel-variabel perempuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Prob *F-statistic* <  $\alpha = 0,05$ ) dengan kemampuan penjelasan model (*Adjusted R*<sup>2</sup>) sebesar 72 persen. AHH perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata 5 persen. Setiap peningkatan satu tahun usia harapan hidup perempuan dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,378 persen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting (2020) serta Fikri & Suparyati (2017). Ketika kualitas kesehatan perempuan di suatu daerah meningkat, ketahanan fisik dan peluang mereka untuk terserap ke dalam pasar kerja atau beraktivitas ekonomi yang produktif juga akan semakin tinggi. Namun, realitanya perempuan rentan mengalami kekurangan gizi dan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai (Todaro &

Smith, 2015) sehingga intervensi pada sektor kesehatan dasar menjadi prasyarat mutlak untuk memutus siklus kemiskinan di NTT.

Variabel pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada taraf 5 persen. Setiap peningkatan pengeluaran perempuan sebesar seribu rupiah akan menekan angka kemiskinan sebesar 0,001 persen. Hasil ini konsisten dengan Sumaw & Aisyah (2023) serta Finkayana & Urmila Dewi (2016). Tingginya pengeluaran perempuan mencerminkan perbaikan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara langsung mampu menjauhkan rumah tangga dari Garis Kemiskinan (GK). Walaupun demikian, Todaro & Smith (2015) menegaskan bahwa perempuan kerap dibayar lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama sehingga potensi mereka untuk meningkatkan pengeluaran rumah tangga seringkali terhambat oleh diskriminasi upah di pasar kerja.

Variabel AMH perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan satu persen angka melek huruf pada perempuan mampu mereduksi tingkat kemiskinan sebesar 0,113 persen. Temuan ini mendukung pernyataan Haughton & Khandker (2009) serta Dores & Koto (2014) bahwa literasi merupakan indikator krusial. Kemampuan membaca dan menulis membuka akses perempuan miskin untuk mengolah informasi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Berbeda dengan temuan Sumaw & Aisyah (2023) di Provinsi Bali yang menunjukkan ketidaksignifikan variabel pendidikan, di Provinsi NTT melek huruf dasar terbukti masih menjadi faktor pembeda bagi perempuan untuk keluar dari kemiskinan.

TPAK perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan partisipasi kerja perempuan sebesar satu persen akan berdampak pada penurunan kemiskinan sebesar 0,019 persen. Temuan ini sejalan dengan Kurniasih et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan tenaga kerja, khususnya perempuan, adalah instrumen sentral dalam pembangunan ekonomi. Pada konteks wilayah berpotensi wisata seperti Provinsi NTT, melibatkan perempuan, misalnya melalui pengelolaan *homestay* atau kerajinan lokal, terbukti mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi keluarga (Widiastini et al., 2026; McCall & Mearns, 2021). Namun, Supraja & Asdi Artosa (2023) mengingatkan bahwa pekerjaan perempuan sering kali masih terpusat di sektor informal pariwisata dengan tingkat jaminan sosial yang sangat lemah.

Di sisi lain, variabel persentase perempuan usia produktif tidak memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT (nilai  $p\text{-value} = 0,3364 > 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa sekadar memiliki proporsi perempuan berusia produktif (15-64 tahun) yang besar tidak secara otomatis menjamin penurunan kemiskinan. Temuan ini melengkapi argumen Haughton & Khandker (2009) terkait struktur demografi rumah tangga, ledakan usia produktif hanya akan menjadi bonus demografi apabila tenaga kerja tersebut benar-benar terserap oleh pasar kerja.

Tabel 4. Ringkasan hasil pengujian regresi terbaik model pariwisata dan nonpariwisata.

Statistik Uji	Model Pariwisata		Model Nonpariwisata	
	Nilai Statistik	Prob	Nilai Statistik	Prob
Uji Chow (F*)	F*: 1334,2	0,0000	F*: 508,41	0,0000
Uji Hausman (H)	H: 0,59773	0,9881	H: 9,79	0,0813
Uji Lagrange Multiplier	LM: 178,22	0,0000	LM: 260,41	0,0000
Kesimpulan: Model Pariwisata REM; Model Nonpariwisata REM				

Tabel 4 menunjukkan serangkaian uji spesifikasi model untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT yang memiliki potensi pariwisata dan model nonpariwisata. Secara konsisten model REM terpilih sebagai model estimasi terbaik untuk kedua model. Pemilihan ini dilihat dari uji Chow dengan nilai *p-value* kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) dan uji Hausman dengan nilai *p-value* lebih dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ).

Tabel 5. Estimasi model pariwisata dan nonpariwisata.

Model Pariwisata (REM)			Model Nonpariwisata (REM)		
Variabel	Koefisien( <i>p-value</i> )		Koefisien( <i>p-value</i> )		
Constant	74,673 (0,000)**		47,516 (0,000)**		
AHH_P <sub>i,t</sub>	-0,582 (0,000)**		-0,034 (0,878)		
Pengeluaran_P <sub>i,t</sub>	-0,001 (0,000)**		-0,001 (0,001)**		
AMH_P <sub>i,t</sub>	-0,074 (0,002)**		-0,150 (0,000)**		
Produktif_P <sub>i,t</sub>	-0,023 (0,484)		0,008 (0,757)		
TPAK_P <sub>i,t</sub>	-0,009 (0,212)		-0,024 (0,020)**		
Adjusted R <sup>2</sup> : 0,837	R <sup>2</sup> : 0,846		Adjusted R <sup>2</sup> : 0,649		R <sup>2</sup> : 0,669
F-statistic: 451,748;			F-statistic: 166,275;		
Prob(F-Statistic): 0,000			Prob(F-Statistic): 0,000		
Uji Normalitas	JB: 3,53	Prob: 0,172	Uji Normalitas	JB: 2,26	Prob: 0,323
Uji Multikolinearitas	AHH_P <sub>i,t</sub> : 1,27; Pengeluaran_P <sub>i,t</sub> : 2,39; AMH_P <sub>i,t</sub> : 2,37; Produktif_P <sub>i,t</sub> : 3,94; TPAK_P <sub>i,t</sub> : 1,16		Uji Multikolinearitas	AHH_P <sub>i,t</sub> : 1,19; Pengeluaran_P <sub>i,t</sub> : 1,81; AMH_P <sub>i,t</sub> : 2,04; Produktif_P <sub>i,t</sub> : 1,19; TPAK_P <sub>i,t</sub> : 1,22	

Keterangan: \*\* adalah signifikan 5 persen

Tabel 5 menunjukkan perbandingan estimasi antara model pariwisata dan nonpariwisata. Secara umum, terdapat perbedaan pola pengaruh variabel perempuan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel AHH perempuan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Pada daerah pariwisata, AHH signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada taraf 5 persen dengan koefisien yang tinggi (-0,582), sedangkan pada daerah nonpariwisata tidak signifikan. Hasil di daerah pariwisata ini sejalan dengan penelitian Ginting (2020) serta Fikri & Suparyati (2017) bahwa daerah dengan AHH tinggi mencerminkan kualitas kesehatan yang baik sehingga peluang bekerja semakin

tinggi. Dalam konteks pariwisata, kesehatan menjadi prasyarat fisik utama bagi perempuan untuk terserap di sektor *hospitality* yang padat karya. Hal ini sejalan dengan Moscardo & Murphy (2014) serta Alarcón & Cole (2019) dalam kajian pariwisata di negara berkembang menemukan bahwa AHH perempuan yang tinggi mencerminkan sistem sanitasi dan kesehatan daerah wisata yang memadai, sehingga perempuan memiliki ketahanan fisik untuk terlibat dalam sektor pariwisata yang padat karya.

Variabel AMH perempuan terbukti signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kedua model. Namun, perannya jauh lebih krusial di daerah nonpariwisata dengan koefisien sebesar  $-0,150$ . Koefisien ini berarti jika AMH perempuan di daerah non pariwisata meningkat sebesar 1 persen, persentase penduduk miskin di daerah tersebut akan turun sebesar 0,15 persen poin. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan daerah pariwisata yang turun sebesar  $0,074$  persen poin jika AMH perempuan di daerah pariwisata naik sebesar 1 persen. Hal ini sejalan dengan Haughton & Khandker (2009) serta Dores & Koto (2014) yang menyatakan bahwa literasi adalah indikator krusial bagi golongan miskin dalam memanfaatkan peluang pendapatan. Tingkat literasi yang memadai memungkinkan perempuan untuk beralih dari pekerjaan informal berupah rendah (seperti pedagang asongan) menuju posisi manajerial atau wirausaha pariwisata yang membutuhkan keterampilan komunikasi dan literasi finansial (Truong et al., 2014; Ferguson, 2011). Di daerah agraris/nonpariwisata, kemampuan baca-tulis menjadi senjata utama perempuan untuk mengakses informasi pasar, permodalan, dan bantuan sosial.

Variabel pengeluaran per kapita perempuan secara konsisten signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf 5 persen di kedua wilayah. Hasil tersebut sejalan dengan Finkayana & Urmila Dewi (2016) yang menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran mencerminkan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya beli ini sangat esensial mengingat perempuan sering kali memiliki potensi pendapatan yang lebih rendah dibanding laki-laki (Todaro & Smith, 2015), sehingga rentan masuk ke dalam kelompok miskin.

Variabel TPAK perempuan menampilkan anomali pola yang bertolak belakang. Pada daerah nonpariwisata, TPAK signifikan berpengaruh negatif pada taraf signifikansi 5 persen (koefisien  $-0,024$ ). Hal ini sejalan dengan Kurniasih et al. (2022) bahwa tenaga kerja menjadi instrumen krusial dalam pembangunan dan penurunan kemiskinan wilayah. Sebaliknya, TPAK justru tidak signifikan pada daerah pariwisata. Mengacu pada Supraja & Asdi Artosa (2023), hal ini dapat dijelaskan karena perempuan di kawasan wisata masih menghadapi hambatan struktural. Pekerjaan mereka sering kali terkonsentrasi di sektor informal dengan perlindungan sosial yang lemah dan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga sekadar berpartisipasi dalam pasar kerja belum cukup kuat untuk mengangkat rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.

Sebaliknya, variabel persentase perempuan usia produktif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik di daerah pariwisata maupun nonpariwisata. Temuan ini menunjukkan adanya fenomena "ilusi bonus demografi" di Provinsi NTT, di mana besarnya kuantitas perempuan pada kelompok usia kerja tidak serta-merta ditransmisikan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Anser et al. (2024) bahwa peningkatan populasi usia kerja perempuan tidak memberikan efek (*dividen*) yang signifikan terhadap perbaikan sosio-ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Fenomena ini terjadi karena mereka tidak dibekali dengan kapabilitas dasar yang memadai dan terus dihadapkan pada hambatan struktural di pasar kerja (Mason et al., 2016).

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan di Provinsi NTT, kapabilitas dan peran ekonomi perempuan yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, Angka Harapan Hidup (AHH), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angka Melek Huruf (AMH) terbukti secara simultan dan parsial signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pengaruh peran perempuan menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan, AHH perempuan, TPAK perempuan, dan AMH perempuan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lebih lanjut berdasarkan karakteristik wilayah, pada daerah pariwisata variabel AHH perempuan, pengeluaran per kapita perempuan, dan AMH perempuan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan TPAK perempuan tidak berpengaruh. Sebaliknya pada daerah nonpariwisata, variabel pengeluaran per kapita perempuan, AMH perempuan, dan TPAK perempuan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan AHH perempuan tidak memiliki pengaruh. Sementara itu, variabel persentase perempuan usia produktif secara konsisten tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, baik pada pemodelan keseluruhan, daerah pariwisata, maupun nonpariwisata.

Menyikapi temuan empiris tersebut, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Provinsi NTT tidak dapat lagi dirancang secara seragam, melainkan harus bersifat asimetris dan responsif terhadap karakteristik sektoral masing-masing wilayah:

1. Intervensi Khusus Sektor Pariwisata: Merespons tingginya urgensi variabel AHH, pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan primer dan sanitasi yang memadai guna menjaga produktivitas fisik perempuan di sekitar destinasi wisata. Selain itu, guna mengatasi TPAK yang tidak signifikan, Dinas Tenaga Kerja harus memperkuat regulasi perlindungan sosial dan pengawasan standarisasi upah minimum bagi pekerja perempuan di sektor *hospitality*, sehingga partisipasi kerja mereka mampu secara nyata mengangkat rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.
2. Pemberdayaan Daerah Nonpariwisata: Mengingat literasi dan partisipasi kerja sangat determinan di wilayah agraris ini, intervensi harus diarahkan pada

program pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan akses permodalan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan teknologi pascapanen guna mendorong hilirisasi komoditas lokal, sehingga nilai tambah dan pengeluaran per kapita perempuan dapat terakselerasi.

3. Mitigasi Ilusi Bonus Demografi: Untuk mengubah ilusi menjadi dividen demografi, program pelatihan vokasi dan kewirausahaan yang diselenggarakan pemerintah harus diselaraskan secara presisi dengan peta jalan (*roadmap*) potensi ekonomi lokal. Hal ini bertujuan agar kuantitas perempuan usia kerja dapat terserap secara optimal ke dalam sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi tinggi.
4. Saran Akademis: Bagi penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk mengadopsi pendekatan ekonometrika spasial (*Spatial Panel Data Regression*). Pendekatan ini krusial untuk mengakomodasi dan mengestimasi efek limpahan keruangan (*spatial spillover effect*) kemiskinan antar-kabupaten/kota yang berbatasan langsung, serta menggunakan proksi ketenagakerjaan mikro yang lebih tajam untuk mengurai anomali struktural pada daerah wisata.

### Ethics approval

Seluruh prosedur dalam penelitian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip serta etika publisitas.

### Competing interests

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti Data Panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8, 64. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1235>
- [2] Alarcón, D. M., & Cole, S. (2019). No sustainability for tourism without gender equality. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 903–919. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1588283>
- [3] Anser, M. K., Tufail, S., Bukhari, M., & Alvi, S. (2024). Socioeconomic Impact of Demographic Change: Do Dividends Exist and are they Gendered? *Polish Sociological Review*, 227(3), 249–267. <https://doi.org/10.26412/psr227.03>
- [4] Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons, Ltd.

- [5] Barro, R. J., Caselli, F., & Lee, J. W. (2013). Symposium on human capital and economic development: An introduction. *Journal of Development Economics*, 104, 181–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.05.003>
- [6] Bentian, B. (2015). Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Taraf Hidup Keluarga di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30 SE-artikel). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/8019>
- [7] BPS. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*.
- [8] BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njlxzl=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- [9] BPS Provinsi NTT. (2025). *Statistik Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- [10] Croissant, Y., & Millo, G. (2008). Panel Data Econometrics in R: The plm Package. *Journal of Statistical Software*, 27(2 SE-Articles), 1–43. <https://doi.org/10.18637/jss.v027.i02>
- [11] Dores, E., & Koto, J. (2014). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 2(2). <https://doi.org/10.22202/economica.2014.v2.i2.225>
- [12] Ferguson, L. (2011). Promoting gender equality and empowering women? Tourism and the third Millennium Development Goal. *Current Issues in Tourism*, 14(3), 235–249. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.555522>
- [13] Fikri, R., & Suparyati, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Media Ekonomi*, 25, 43. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5203>
- [14] Finkayana, I. P. A., & Urmila Dewi, M. H. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 7, Juli 2016 (pp. 729-947). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/22752/15014>
- [15] Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761–766. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- [16] Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7, 42–61. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197>
- [17] Greene. (2012). *Econometric Analysis Seventh Edition*. Pearson.

- [18] Gujarati, D., & Porter, D. (2008). *Basic Econometrics* (Anne E Hilbert (ed.); Fifth Edit). McGraw-Hill/Irwin.
- [19] Haughton, J., & Khandker, S. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*.
- [20] Kurniasih, C. E., Tampubolon, D., & Ula, T. (2022). Analisis Pengaruh Indikator Pasar Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. In *National Multidisciplinary Sciences* (Vol. 1, Issues 4 SE-Articles, pp. 572–584). <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.109>
- [21] Marizka, R., Nurrizalia, M., Wati, E. R. K., Fadsyah, N. A., Sari, L. P., & Lusiyani, L. (2024). Peran Perempuan dalam Pengembangan Desa Wisata Guna Mengatasi Kesenjangan Gender di Sektor Wisata. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3 SE-Articles), 9. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.358>
- [22] Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic Dividends, Human Capital, and Saving. *Journal of the Economics of Ageing*, 7, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004>
- [23] McCall, C., & Mearns, K. (2021). Empowering Women Through Community-Based Tourism in the Western Cape, South Africa. *Tourism Review International*, 25. <https://doi.org/10.3727/154427221X16098837279967>
- [24] Mohd Razali, N., & Yap, B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. *J. Stat. Model. Analytics*, 2(1), 21–33.
- [25] Moscardo, G., & Murphy, L. (2014). There is No Such Thing as Sustainable Tourism: Re-Conceptualizing Tourism as a Tool for Sustainability. *Sustainability, MDPI*, 6(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su6052538>
- [26] Owusu, J., Akanbasiam, A., & Anyesepari, A. (2013). Microfinance Schemes and Poverty Reduction among Women in the Northern Region of Ghana. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(19), 99–108. [www.ijhssnet.com](http://www.ijhssnet.com)
- [27] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2015). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025*.
- [28] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023*.
- [29] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029*.

- [30] Prasetya, G. M., & Sumanto, A. (2022). Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(2), 467–477.
- [31] Prawoto, N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(April), 56–68. <https://media.neliti.com/media/publications/30659-ID-memahami-%0Akemiskinan-dan-strategi-penanggulangannya.pdf>
- [32] Scheyvens, R. (2010). Promoting Women’s Empowerment Through Involvement in Ecotourism: Experiences from the Third World. *Journal of Sustainable Tourism*, May 1, 232–249. <https://doi.org/10.1080/09669580008667360>
- [33] Stonich, S. C., Sorensen, J. H., & Hundt, A. (1995). Ethnicity, class, and gender in tourism development: The case of the Bay Islands, Honduras. *Journal of Sustainable Tourism*, 3(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/09669589509510705>
- [34] Suharianto, J., & Lubis, H. (2022). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara. *Niagawan*, 11(2), 168. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.35113>
- [35] Sumaw, F., & Aisyah, S. (2023). *The Effect of the Women’s Human Development Index on the Poverty Level: The Case of the Province of Bali* (pp. 870–879). [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0\\_72](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_72)
- [36] Supraja, M., & Asdi Artosa, O. (2023). Kemiskinan Pekerja Perempuan dan Sektor Informal di Sarkem. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(1 SE-Articles), 19–40. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.311>
- [37] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Truong, V. D., Hall, C. M., & Garry, T. (2014). Tourism and poverty alleviation: perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(7), 1071–1089. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.871019>
- [38] Tucker, H., & Boonabaana, B. (2012). A critical analysis of tourism, gender and poverty reduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(3), 437–455. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.622769>
- [39] United Nations. (2018). *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*. United Nations Publications.
- [40] Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan E-views* (Edisi Keli). UPP STIM YKPN.
- [41] Widiastini, N. M. A., Karta, N. L. P. A., Arsa, I. K. S., & Wau, R. S. (2026). Maximizing Community-Based Tourism for the Economic Empowerment of Rural Women. *International Journal of Glocal Tourism*, 6(4 SE-), 303–319. <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/injogt/article/view/1069>

- [42] World Bank. (2010). *Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia Menuju terciptanya pekerjaan yang lebih baik dan jaminan perlindungan bagi para pekerja.* worldbank.org